



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

Nuraeni Nuraeni¹; Dida Farida LH²; Uu Suparman³

¹Universitas Garut

24022116181@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

didafaridalh@uniga.ac.id

³Universitas Garut

uusuparman@uniga.ac.id

Abstrak

Analisis kinerja keuangan terhadap laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan menggunakan perhitungan rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi dikategorikan kurang dengan rata-rata 11,54%, rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata 63,31%, rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan kurang dengan rata-rata 18,73%, rasio efektivitas PAD dikategorikan belum efektif dengan rata-rata 95,34% dan rasio efisiensi keuangan daerah dikategorikan kurang efisien dengan rata-rata 98,46%. Pada komponen pendapatan asli daerah dikategorikan kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan, desentralisasi fiskal, ketergantungan, kemandirian, efektivitas, efisiensi keuangan daerah.

Abstract

Financial performance analysis of the budget realization report (LRA) is one of the parameters in measuring regional financial management performance. Financial performance analysis uses the calculation of the degree of decentralization ratio, regional financial dependence, regional financial independence, regional financial effectiveness and efficiency. This research aims to measure the financial performance of the Garut Regency Regional Government during the 2015-2019 Fiscal Year. This research uses secondary data obtained from interviews, documentation and literature using a qualitative descriptive approach. The results of the research show that, when viewed from the degree of decentralization ratio, the regional government's financial performance is categorized as poor with an average

of 11.54%, the regional financial dependency ratio is categorized as very high with an average of 63.31%, the regional financial independence ratio is categorized as low with an average -an average of 18.73%, the PAD effectiveness ratio is categorized as ineffective with an average of 95.34% and the regional financial efficiency ratio is categorized as less efficient with an average of 98.46%. The regional original income component is categorized as poor, while the regional income ratio component is categorized as moderate, and expenditure growth is categorized as poor because the portion of operating expenditure is greater than capital expenditure. It is hoped that the Regional Government of Garut Regency can further increase PAD, as well as prioritize the allocation of regional spending.

Keywords: *financial performance, fiscal decentralization, dependency, independence, effectiveness, regional financial efficiency.*

1 Pendahuluan

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan aktivitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasikan anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Menurut kamus akuntansi manajemen, Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas atau suatu proses dari suatu unit organisasi. Sementara, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan laporan realisasi anggaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan instrumen dan tata tertib yang mengatur mengenai mekanisme dan standar pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta transaksi selama satu periode tahun anggaran. Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan ketaatan penyajian serta kesesuaian penyajian laporan menurut kaidah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut?”.

2 Tinjauan Pustaka

2.1. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Susanto (2015), mengatakan bahwa kondisi Kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penggunaan analisis rasio difokuskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Susanto (2015) juga mengemukakan bahwa untuk menentukan corak ekonomi daerah digunakan variabel-variabel pokok seperti: kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi fiskal daerah), aparatur pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, ekonomi, demografi, organisasi masyarakat dan penunjang, terdiri dari aspek politik dan hukum yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan rendahnya kontribusi pada terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi pada maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Secara umum, nilai derajat desentralisasi dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Secara umum, nilai ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Secara umum, nilai kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.3 Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2019:140)

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien dan begitupun sebaliknya. Secara umum, nilai efisiensi keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut;

Tabel 2.5 Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien

31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2010:146)

3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Mengolah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio terhadap keuangan pemerintah daerah yang mana untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada lembaga BPKAD Kabupaten Garut.

4 Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Garut tersebut adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi

Untuk mengukur tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan, yaitu dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi. Adapun Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi pada BPKAD Kabupaten Garut selama 5 tahun, disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	PAD (a)	TPD (b)	RDD (%) (c=a/b)*100%	Naik/ Turun
2015	Rp. 419.201.758.615,11	Rp. 3.540.619.065.782,11	11,84%	-
2016	Rp. 385.312.223.031,89	Rp. 3.748.975.224.710,89	10,28%	(1,56%)
2017	Rp. 692.255.365.083,00	Rp. 4.422.978.254.586,00	15,65%	5,37%
2018	Rp. 421.299.024.535,00	Rp. 4.301.343.515.211,00	9,79%	(5,86%)
2019	Rp. 486.565.326.730,00	Rp. 4.794.836.329.500,00	10,15%	0,36%

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, (data diolah kembali 2022)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat capaian rasio derajat desentralisasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut tahun 2015-2019 belfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio derajat desentralisasi tahun 2015 mencapai 11,84%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10,28%, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,65%, pada tahun 2018 mengalami ppenurunan Kembali sebesar 9,79% dan pada tahun rasio derajat desentralisasi mengalami kenaikan menjadi 10,15%. Apabila didasarkan pada kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi dari tahun 2015-2019, maka penilaiannya masuk kedalam kriteria “kurang”.

Nilai prosentase yang kurang diakibatkan jumlah total pendapatan daerah yang tinggi namun jumlah PAD yang masih kurang. Walaupun total pendapatan daerah di Kabupaten Garut mengalami

peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak sebanding dengan peningkatan PAD pada BPKAD Kabupaten Garut. Jika dilihat dari tabel 4.1 bahwa rasio derajat desentralisasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut rata-rata masih dibawah 20% yang berarti kurangnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Garut yang mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi masih tergolong kurang. Maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yaitu dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah sebagai alat ukurnya. Adapun Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Garut selama 5 tahun, disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Garut tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (a)	Total Pendapatan Daerah (b)	RKKD(%) (c=a/b)*100%	Naik/Turun
2015	Rp. 2.649.945.600.847,00	Rp. 3.631.183.716.298,00	72,97%	-
2016	Rp. 2.633.415.618.800,00	Rp. 4.019.998.196.150,35	65,50%	(7,47%)
2017	Rp. 2.693.488.880.842,00	Rp. 4.528.926.876.090,17	59,48%	6,02%
2018	Rp. 2.645.148.784.000,00	Rp. 4.361.191.632.994,00	60,65%	(1,17%)
2019	Rp. 2.801.588.537.657,00	Rp. 4.830.655.803.196,00	57,99%	2,66%

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, diolah Kembali 2022

Selama kurun waktu 5 tahun, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Garut berada pada tingkat rata-rata 63,31%, sehingga dikatakan berada pada kategori tinggi. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat Dan Provinsi, dan belum cukup mampu mencukupi kebutuhan daerah sendiri.

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai alat ukurnya. Adapun Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Garut selama 5 tahun, disajikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	PAD (a)	Dana Perimbangan (b)	RKMKD(%) (c=a/b)*100%	Naik/Turun
----------------	---------	----------------------	--------------------------	------------

2015	Rp. 419.201.758.615,11	Rp. 2.088.321.037.239,00	20,07%	-
2016	Rp. 385.312.223.031,89	Rp. 2.633.415.618.800,00	14,63%	(5,44%)
2017	Rp. 692.255.365.083,00	Rp. 2.693.488.880.842,00	25,70%	11,07
2018	Rp. 421.299.024.535,00	Rp. 2.645.148.784.000,00	15,92%	(9,78)
2019	Rp. 486.565.326.730,00	Rp. 2.801.588.537.657,00	17,37%	1,45

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, diolah Kembali 2022

Selama kurun waktu 5 tahun, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut berada pada tingkat rata-rata 18,73%, sehingga dikatakan berada pada kategori rendah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih tergolong rendah. Batuan pusat dan provinsi masih menjadi prioritas utama dalam membiayai roda pemerintahannya.

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas PAD sebagai alat ukurnya. Adapun Perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada BPKAD Kabupaten Garut selama 5 tahun, disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (a)	Realisasi PAD (b)	RE.PAD(%) (c=a/b)*100%	Naik/Turun
2015	Rp. 392.357.893.451,00	Rp. 419.201.758.615,11	106,84%	-
2016	Rp. 427.865.899.432,35	Rp. 358.312.223.031,89	83,74%	(23,1%)
2017	Rp. 714.955.896.619,17	Rp. 692.255.365.083,00	96,82%	13,08%
2018	Rp. 456.722.126.686,00	Rp. 421.299.024.535,00	92,25%	(4,57%)
2019	Rp. 501.247.176.351,00	Rp. 486.565.326.730,00	97,08%	4,83%

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, diolah Kembali 2022

Tabel 4.4 menunjukkan rasio efektivitas PAD Kabupaten Garut pada tahun 2015-2019 mencapai rasio dibawah 100% dengan rata-rata 95,34% sehingga kinerja pemerintah Kabupaten Garut dalam mengumpulkan pad selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan cukup efektif karena belum berhasil menjalankan tugasnya dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditentukan. Kurangnya rasio efektivitas ditentukan dari upaya pemerintah daerah dalam meralisasikan target PAD yang telah ditetapkan serta besarnya target yang ditetapkan tersebut. Kemampuan daerah dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai sebesar 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas PAD maka menunjukkan upaya pemungutan PAD yang dilakukan pemeritah daerah semakin baik.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja keuangan melalui faktor internal yang berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, tupoksi yang jelas bagi aparatur negara pengelola PAD, kerjasama dengan pihak ketiga. Faktor penyebab belum efektifnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut antara lain sumber daya aparatur yang kurang memadai, penerapan sanksi pelanggaran hukum perpajakan, sarana dan prasarana yang belum memadai, organisasi pengelola keuangan dan pendapatan daerah masih menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu terdapat potensi yang belum digali, penggunaan sistem informasi dan teknologi dengan cara melakukan pengoptimalan potensi PAD dengan pembaharuan database dan penilaian Kembali objek pajak/retribusi, penataan sistem administrasi, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PAD, peningkatan SDM serta kinerja aparatur.

e. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Untuk mengukur Perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, yaitu dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah sebagai alat ukurnya. Adapun Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Garut selama 5 tahun, disajikan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Pengeluaran (a)	Realisasi Penerimaan (b)	REKD(%) (c=a/b)*100%	Kriteria
2015	Rp. 3.549.252.715.590,00	Rp. 3.540.619.065.782,11	100,24%	-
2016	Rp. 3.691.518.655.216,00	Rp. 3.748.975.224.710,89	98,47%	(1,77%)
2017	Rp. 4.369.933.640.924,00	Rp. 4.422.978.254.586,00	98,81%	0,34%
2018	Rp. 4.257.224.285.897,00	Rp. 4.301.343.515.211,00	98,98%	0,17%
2019	Rp. 4.594.611.035.095,00	Rp. 4.794.836.329.500,00	95,83%	(3,15%)

Sumber: BPKAD Kabupaten Garut, diolah Kembali 202

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah kabupaten garut tahun anggaran 2015-2019 dikategorikan kurang efisien dengan tingkat rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 98,46%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan PAD kurang efisien yang ditandai dengan trend rasio di bawah 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip *value for money* yang ekonomis, efektif dan efisien.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten garut selama kurun waktu tahun anggaran 2015-2019, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata masih di bawah 20% dengan kriteria “kurang”, yang berarti bahwa rendahnya pendapata asli daerah di Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan karena selama ini pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sumber pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata masih di atas 50% dengan kriteria “sangat tinggi”, yang berarti bahwa tingginya pendapatan dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Garut. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih banyak mengedepankan untuk alokasi umum dibandingkan untuk alokasi modal, sehingga membuat pemerintah mengalami banyak beban keuangan yang menyebabkan ketergantungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu menekan ketergantungan pada pemerintah pusat.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata di bawah 20% dengan kriteria “kurang” yang berarti bahwa rendahnya pendapata asli daerah dibandingkan pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat di Kabupaten Garut. Hal ini karena nilai derajat desentralisasi yang rendah menyebabkan ketergantungan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melakukan kemandirian dalam menjalankan rumah tangganya sendiri.
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan rasio efektivitas PAD tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata di bawah 100% dengan kriteria “cukup efektif” yang berarti bahwa pemerintah daerah belum berhasil menjalankan tugasnya dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemungutan PAD belum begitu baik.
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata di atas 40% dengan kriteria “sangat tidak efisien” yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tidak optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis diatas, maka saran yang dapat diberikan pada pemerintah daerah kabupaten garut terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.
2. Optimalisasi perolehan PAD melalui penggalan sumber-sumber baru penerimaan daerah sebab jumlah bantuan dana dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih cukup besar.
3. Memperbesar alokasi belanja modal yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana ekonomi serta layanan publik agar dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Garut.

Daftar Pustaka

- Mahmudi (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah. Yogyakarta. Edisi Ke Empat. UPP.STIM.YKPN.
- Br. Purba Rahima, Umar Haryono, Pratama Nasution A, Amelija N (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora. SCENARIO 2020*. e-ISSN 2775-4049.
- Farida siti A, Maulana Faisal (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. p-ISSN: 2085-6555; e-ISSN 2715-9259. Vol. 11 No. 2 Desember 2019: 107-124.

- Fajriansyah Y, Elim I, Walandow K.S, (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. Vol. 7 No. 3 Juli 2019, Hal. 4465-4474.
- Haryono, Arsad (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompus). Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan & Ekonomi. e-ISSN: 2614-6002. Vol. 4, No. 1 (2020).
- Karlina Anis (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. ISSN: 2460-0585. Vol. 6 No. 3 Maret 2017.
- Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. (T. U. Penyunt.) Malang: UB Press